

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (Anggara, 2018:35) kebijakan publik merupakan suatu hal yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, penyebab peraturan wajib dikerjakan agar bermanfaat untuk kepentingan seluruh warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Kebijakan dikatakan sebagai hasil analisis yang sangat dalam dari berbagai alternatif yang tertuju kepada hasil tentang suatu alternatif yang paling baik bagi keperluan sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai keberuntungan sehingga publik dapat berkontribusi dalam pembangunan negaranya.

Parker berpendapat bahwa (Anggara, 2016:502) merumuskan kebijakan publik sebagai tujuan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah pada periode tertentu untuk menanggapi terhadap suatu objek yang krisis. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keputusan mutlak haruslah memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dan biasanya memuat prosedur pencapaian tujuan yang telah ditargetkan dengan kesepakatan bersama.

Anderson (Nurcholis dan Enceng, 2019:7.1) menguraikan bahwa ada lima hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pertama, sasaran ataupun program haruslah mengarah pada perilaku random atau peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Kedua, kebijakan sebagai suatu konsep perilaku aparatur negara perihal

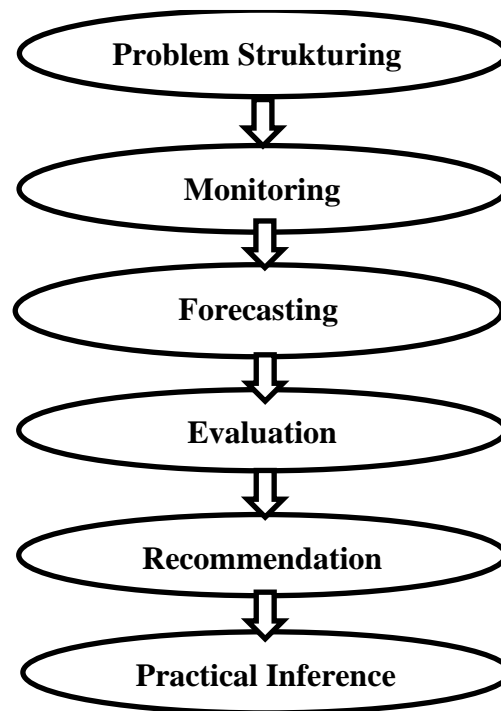
sejumlah kebebasan pengambilan keputusan sendiri secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus sesuai dengan apa yang pemerintah secara nyata kerjakan, bukan dengan rencana yang dikatakan akan diberbuat. Keempat, bentuk dari sebuah kebijakan dapat berupa hal yang positif maupun negatif. Kelima, kebijakan yang berwujud positif berlandaskan pada ketetapan hukum dan kekuasaan, sedangkan tujuan dari kebijakan publik ialah berhasilnya kesejahteraan untuk warga negara melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih secara sah dan otentik sebab peraturan tersebut ditetapkan oleh institusi yang mempunyai pernyataan yang sah dalam memutuskan pada sistem pemerintahan. Kebijakan dapat diartikan menjadi suatu hukum yang harus ditaati oleh publik dan aturannya bersifat mengikat.

Berdasarkan pandangan di atas, tujuan utama dari suatu kebijakan publik ialah menyangkut kepentingan khalayak umum. Implementasi kebijakan harus sebuah jawaban terhadap berbagai keinginan, masalah, aspirasi, serta pandangan sosial dan moral pada masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana dengan lancar bila pemerintah berhasil melaksanakan suatu kebijakan publik dengan tepat dan relevan. Menciptakan sebuah informasi yang relevan dengan kebijakan yang dibuat perlu adanya tahapan dalam analisis kebijakan yang sesuai, yaitu:

- 1) Pemantauan, dapat menghasilkan informasi yang berkaitan dengan sebab akibat dari kebijakan pada masa lalu.
- 2) Prakiraan, berupa memprediksi suatu hasil informasi mengenai konsekuensi pada masa mendatang dari berbagai kebijakan.

- 3) Evaluasi, yaitu membandingkan dan menilai hasil informasi mengenai nilai kebijakan masa lalu dan masa mendatang.
- 4) Rekomendasi, ialah memberikan petunjuk atau pandangan yang memungkinkan menciptakan informasi mengenai cara bertindak pada masa mendatang yang akan membawa dampak yang bermakna.

Tahapan analisis umum yang berhubungan dengan dengan metode-metode analisis kebijakan dalam proses analisis kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:



(Sumber:Anggara, 2016:514)

**Gambar 2.1** Proses hirarki kebijakan secara umum

Bagian utama dalam kebijakan publik adalah tahapan kebijakan publik. Sudut pandang dari kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan kerja atau kesatuan

jaringan yang saling berkaitan dari satu tahap ketahap lainnya. Menurut William Dunn (Anggara, 2018:120) ada beberapa tahapan analisis yang harus dilaksanakan, yaitu :

1) Penyusunan agenda

Merupakan suatu tahap dan proses yang tepat sasaran dalam ranah kebijakan publik secara nyata. Di dalam Proses ini ada celah untuk memahami persoalan secara umum dan mengutamakan pada agenda publik yang menjadi jaminan. Apabila suatu isu mencapai status sebagai masalah publik dan dijadikan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak memperoleh pengakuan publik lebih dari pada isu lainnya.

2) Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang telah ada pada tahap sebelumnya, selanjutnya dikelola oleh implementator kebijakan. Isu-isu tersebut akan dicarikan solusi yang paling baik. Masalah yang dipecahkan berasal dari beberapa pilihan terbaik kebijakan yang telah ada, sama halnya dengan perjalanan suatu masalah untuk bergabung ke dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif bersaing untuk dapat diterapkan sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah.

3) Adopsi/legitimasi

Bertujuan memberikan wewenang pada tahap mendasar pemerintahan. Jika keputusan legitimasi dalam ruang lingkup masyarakat diatur oleh kewenangan rakyat, maka warga negara akan mengikuti petunjuk pemerintah dan harus meyakini bahwa keputusan pemerintah adalah sah.

#### 4) Penilaian/evaluasi kebijakan

Evaluasi dilihat sebagai suatu pekerjaan fungsional, berarti evaluasi kebijakan tidak hanya berlaku pada proses akhir, tetapi juga berlaku dalam keseluruhan dari proses kebijakan. Tahap evaluasi terdiri atas proses merumuskan masalah, program kegiatan yang disampaikan, mengerjakan masalah kebijakan, tahap pelaksanaan, dan dampak nyata dari program kebijakan.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dari semua proses kebijakan dan sebuah metode supaya kebijakan tersebut bisa memperoleh tujuan yang telah dikehendaki. Tahapan Implementasi dapat dikerjakan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Menurut Wahab (Anggara, 2016:530) implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan sebagai suatu tahapan untuk melaksanakan keputusan kebijakan, yang berwujud berkas perundang-undang, dekrit presiden, keputusan pemerintah, peraturan pemerintah, perintah dari eksekutif dan keputusan pengadilan.

Menurut Mazmania dan Sabatier (Anggara, 2016:532) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan dasar yang berwujud keputusan peradilan, perundang-undang dan bentuk perintah keputusan eksekutif. Keputusan tersebut menjelaskan suatu isu yang ingin ditangani, serta secara jelas sasaran yang ingin diperoleh dengan beberapa metode untuk mengatur proses implementasinya. Masalah dari implementasi kebijakan bermakna untuk berusaha mengerti secara nyata terjadi setelah suatu program ditetapkan dan dirumuskan, yakni rangkaian peristiwa yang terjadi sesudah tahap

pengesahan kebijakan negara, baik berkaitan dengan usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk memberikan efek tertentu kepada masyarakat secara luas.

Tahap dari implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan instansi administrasi yang bertanggungjawab mengerjakan program dan memperlihatkan kepatuhan pada sekelompok sasaran, melainkan berkaitan pula dengan rangkaian kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung memperoleh perilaku dari pihak-pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Grindle dan Quade (Anggara, 2018:261) mengemukakan bahwa penilaian terhadap kinerja implementasi kebijakan publik haruslah mengamati variabel kebijakan, lingkungan, dan organisasi. Petetapan perhatian diperlukan agar kebijakan secara tepat dipilih, sehingga masyarakat bisa berkontribusi secara maksimal untuk mencapai target sasaran yang diharapkan. Ditemukannya kebijakan yang telah terpilih maka perlu adanya organisasi pelaksana agar sumber daya dan kewenangan tercipta guna mendukung pengimplementasian kebijakan bagi pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (Anggara, 2018:262) tertuju pada tiga hal, yaitu:

- 1) Tingkatan ketaatan birokrat kepada birokrat di level atasnya ataupun struktur birokrat diatur dalam perundang-undangan.
- 2) kemudahan aktifitas dan persoalan yang tidak ada.

- 3) Pengimplementasian dari semua program dapat terarah dan memberikan manfaat.

### **2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan**

Pendekatan *top-down* atau disebut dengan istilah *policy centered*, karena berfokus dan berusaha mendapatkan fakta bisakah kebijakan tersebut menjadi efektif atau tidak. Pendekatan ini lebih berfokus pada faktor penghambat dari implementasi kebijakan karena menerangkan permasalahan atau faktor kegagalan implementasi.

#### **1. Model Christopher Hood**

Hood (Anggara, 2018:245) dalam bukunya yang berjudul “*Limit to administration*” memberikan lima syarat supaya implementasi bisa berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Bentuk dari implementasi yang sesuai merupakan hasil dari instansi yang baik, seperti militer menggunakan hirarki yang jelas.
- b. Jelasnya nilai-nilai dan tujuan.
- c. Sekelompok orang yang akan melakukan beberapa hal.
- d. Antara organisasi satu dengan organisasi lain harus memiliki komunikasi yang sempurna.
- e. Tidak tertekan oleh waktu.

#### **2. Model George Charles Edward III**

Dalam model yang dikembangkan George Charles Edward III (Suntoro dan Hariri, 2015:68–69), menguraikan empat variabel yang mempengaruhi kegagalan

atau keberhasilan implementasi. Keempat variabel terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam penentuan keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang baik harusnya sudah dibangun sejak formulasi. Penyaluran berita diperlukan agar pencetus dari keputusan dan implementator semakin yakin dalam melaksanakan tiap-tiap kebijakan yang akan digunakan pada publik. Tiga indikator untuk menentukan keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu:

- Transmisi, implementasi kebijakan publik harus disalurkan kepada birokrat pelaksana. Persoalan transmisi sering terjadi pada saat pelaksana menolak perintah atau tidak menyetujui kebijakan dengan cara menutup saluran komunikasi yang diperlukan.
- Kejelasan (*Clarity*), perlu adanya jelasnya tujuan dan metode apa yang digunakan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang telah diputuskan.
- Konsistensi, implementasi yang efektif harus membutuhkan sikap yang jelas tidak berubah-ubah. Keteraturan dalam menjalankan program yang telah disepakati sehingga tidak ambigu ketika melaksanakannya.

b. Sumber daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik perlu adanya sumber daya. Hal ini sebagai pendukung agar terlaksana dengan baik, sumber daya yang diperlukan:



- Staf, terkait dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksana dan kemampuan yang dimiliki oleh staf tersebut. Tentunya harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- Informasi, berkaitan dengan data dan cara mengerjakan kebijakan.
- Kewenangan, suatu yang diinginkan oleh implementator tergantung sangat beragamnya kebijakan yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang kerja yang telah diberikan.
- Fasilitas, terdiri atas fasilitas fisik pendukung yang dibutuhkan untuk melancarkan proses kebijakan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari implementator terhadap kebijakan program yang harus dikerjakan karena tiap-tiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang mempunyai komitmen tinggi supaya tercapai tujuan sasaran kebijakan yang diharapkan. Ada empat unsur utama yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan pelaksana dalam melakukan kebijakan yaitu, kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana serta intensitas respons.

d. Struktur birokrasi

Edward III menetapkan suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur pekerjaan dan kegiatan implementator, karena biasanya pelaksanaan

program melibatkan lebih dari satu institusi. Manfaat dari penetapan prosedur kerja ini agar terlaksana dengan teratur dan dipahami oleh target sasaran.

### **3. Model Merilee S. Grindle**

Grindle mengemukakan dalam melaksanakan suatu kebijakan tergantung pada isi dan maknanya, serta pencapaian kesuksesan bergantung pada tiga bentuk variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

#### a) Isi kebijakan

Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- Adanya program yang mempengaruhi sebuah kepentingan.
- Beberapa manfaat yang akan diperoleh.
- Luasnya perubahan yang dikerjakan.
- Kewenangan dalam pengambilan keputusan.
- Yang menjalankan sebuah program.
- Ketersediaan sumber daya.

#### b) Makna implementasi

- Kewenangan, keterkaitan, dan Langkah strategi pelaksana yang terlibat.
- Sikap penguasa dan lembaga.

### **4. Model Daniel Mazmania dan Paul A. Sebastier**

Mazmania dan Sebastier (Anggara, 2018:268) berpendapat bahwa analisis implementasi kebijakan berperan penting dalam menggambarkan tiap-tiap variabel

yang mempengaruhi terwujudnya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga macam bagian, yaitu:

- a. sulit tidaknya persoalan yang ditangani, mencakup:
  - Kesulitan yang bersifat teknis.
  - Sikap dan perilaku kelompok sasaran yang beragam.
  - Perbandingan target kelompok dengan presentasi masyarakat.
  - Ruang lingkup perubahan perilaku yang dibutuhkan.
- b. Kemampuan dalam memutuskan kebijaksanaan untuk menyusun secara tepat proses implementasi, mencakup:
  - Konsistensi tujuan dan kejelasan
  - Digunakannya teori kausal yang baik.
  - Ketetapan alokasi sumber biaya.
  - Keterpautan struktur dari lembaga pelaksana.
  - Aturan ketetapan dari badan pelaksana.
  - Rekrutmen aparat pelaksana.
  - Saluran formal pihak luar.
- c. Pengaruh langsung terhadap berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang terdapat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, mencakup:
  - Keadaan sosial, ekonomi dan teknologi.
  - Dukungan dari masyarakat.

- Sumber dan sikap yang dipunyai kelompok.
- Dukungan dari pejabat elit.
- Komitmen dan kemampuan *leadership* para pejabat pelaksana.

#### **5. Model Van Horn dan Van Meter**

Van Horn dan Van Meter (Wahab, 2016:165) membuat tipologi kebijakan berdasarkan jumlah setiap perubahan yang akan diperoleh, dan jangkauan komitmen terhadap tujuan diantara para aktor, atau pihak yang terlibat dalam tahapan implementasi. Pernyataan lain dikemukakan oleh kedua ahli di atas adalah jalan yang mengkaitkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang selalu berhubungan, variabel yang dimaksud adalah:

- Tujuan standarisasi kebijakan.
- Asal muasal kebijakan.
- Ciri-ciri badan /instansi pelaksana.
- Komunikasi yang terjalin antar organisasi terkait dan beberapa kegiatan pelaksanaan.
- Sikap aparat pelaksana.
- Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

#### **6. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn**

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 2016:167) mengimplementasikan kebijakan negara mencakup kriteria sebagai berikut:

- Keadaan eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi.

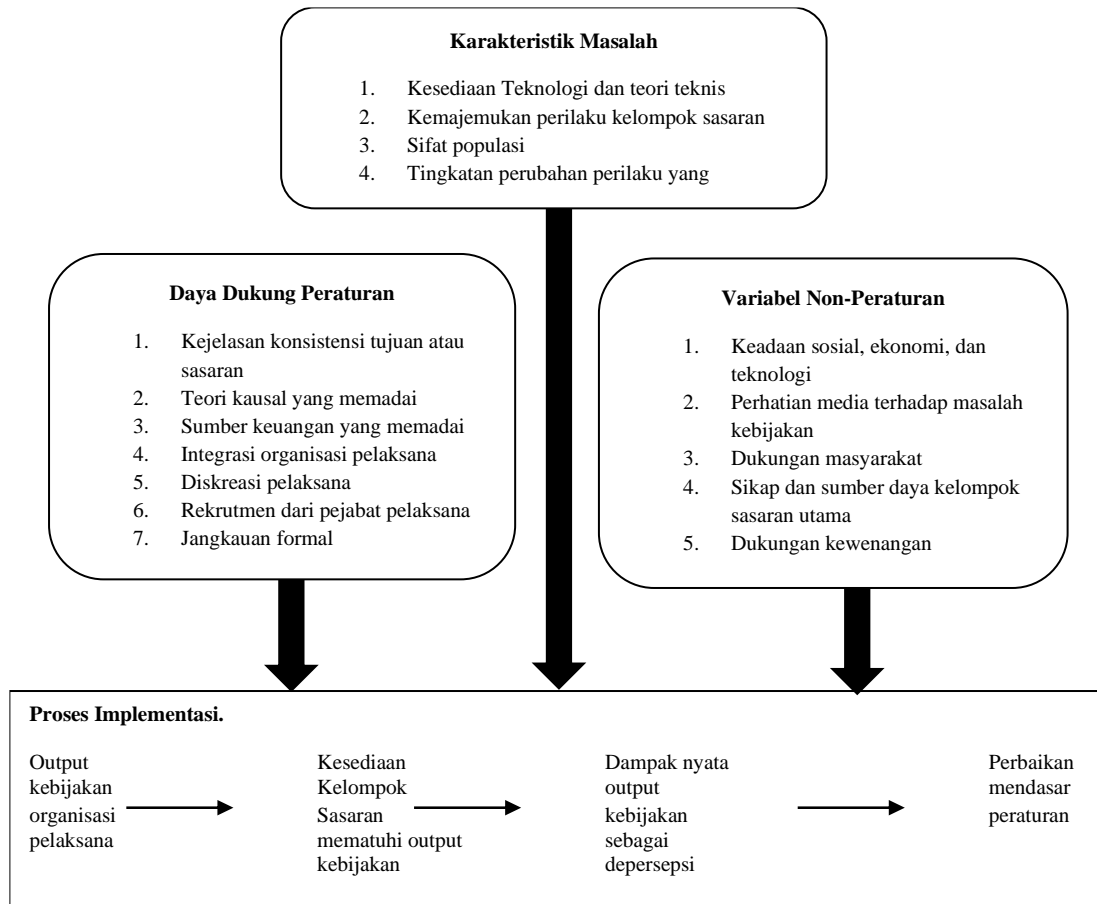
- Tersedianya sumber daya dan waktu yang cukup bagus.
- keragaman sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
- Sikap bijaksana aparat yang melakukan.
- Hubungan yang saling ketergantungan harus diminimalisir.
- Kesepakatan dan pemahaman terhadap tujuan.
- Pekerjaan dirincikan dan diletakkan pada urutan yang tepat.
- Koordinasi dan komunikasi yang terjalin harus sempurna.
- Pelaksana yang mempunyai wewenang bisa menuntut dan memperoleh ketaatan yang sempurna.

Pendekatan kedua adalah *bottom-up*, fokusnya terletak pada tingkat birokrat dan kelompok sasaran. Implementasi akan tercapai jika masyarakat dilibatkan dalam tiap tahap pelaksanaan kebijakan. Pendekatan *bottom-up* dimulai dengan pengenalan jejaring para aktor yang terlibat dalam mengutarakan layanan dari satu area ataupun lebih area lokal, dan ditanyai tentang tujuan, strategi, aktifitas, dan kontak yang sudah dibuat. Pendekatan yang dikembangkan oleh Hanf, Hjern, dan Porter (Wahab, 2016:216–218) memiliki beberapa keunggulan, pertama metodologi dikembangkan secara eksplisit dan dapat direplikasi dalam mengidentifikasi jaringan kebijakan. Kedua, menilai tingkat kepentingan relatif dari berbagai program pemerintah *vis a vis* organisasi privat dan kekuatan-kekuatan pasar dalam menangani permasalahan. Ketiga, pendekatan ini mampu menangani area kebijakan atau masalah yang melibatkan serangkaian program publik dan privat, yang semuanya sama penting.

Selain keunggulan-keunggulan, pendekatan ini memiliki keterbatasan yaitu para peneliti *bottom-up* terlalu menekankan kemampuan *periphery* untuk menekan pusat dan gagal mulai dari teori eksplisit mengenai faktor-faktor yang memengaruhi subjek masalah.

#### **2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2016:257) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, karakteristik yang timbul dari masalah (*tractability of the problem*), karakteristik dari isi kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), karakteristik dari kondisi lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*). Berikut merupakan penjelasan mengenai tiga faktor tersebut:



(Sumber: Sahya Anggara, 2018:258)

**Gambar 2.2** Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier

### 1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan Teknis dari permasalahan, karena ada sebagian persoalan sosial dapat dikerjakan secara teknis dan disisi lainnya beberapa masalah yang sukar untuk dipecahkan.
- b. Tingkatan keragaman kelompok sasaran. Apabila kelompok sasarannya homogen maka Suatu program relatif mudah diimplementasikan.

- c. Ukuran sekelompok yang dijadikan target terhadap jumlah populasi. Suatu program kegiatan akan sulit untuk dikerjakan jika sasarannya meliputi banyak populasi.
  - d. Jangkauan perubahan perilaku yang diinginkan. Sebuah program secara mudah dilaksanakan jika tepat dalam penyampaian kepada masyarakat.
2. Karakteristik Kebijakan
- a. Kejelasan isi implementasi kebijakan akan mudah dipahami maksud dan tujuan oleh pelaksana jika jelas dan terperinci isi dari kebijakan tersebut.
  - b. Seberapa besar program yang diimplementasikan memiliki dukungan teoritis.
  - c. Finansial adalah faktor penting untuk setiap program sosial, maka sumber daya finansial harus besar.
  - d. Seberapa banyak keterkaitan dan dukungan setiap lembaga pelaksana.
  - e. Lembaga pelaksana mempunyai ketentuan yang jelas.
  - f. Ukuran kesungguhan birokrat untuk mencapai tujuan.
  - g. Sejauh mana jangkauan pihak luar bergabung untuk pelaksanaan program.
3. Lingkungan Kebijakan
- a. Keadaan ekonomi sosial masyarakat dan tingkat teknologi yang dimiliki. Karena masyarakat yang sudah terbuka lebih mudah menerima pembaharuan ketimbang masyarakat yang belum terbuka atau tradisional.
  - b. Partisipasi dan bantuan masyarakat terhadap kebijakan. Biasanya kebijakan yang menghasilkan manfaat dan dampak nyata lebih mudah mendapat perhatian dari masyarakat.



- c. Sikap dari kelompok tertentu. Caranya bisa dengan kelompok tertentu melakukan campur tangan terhadap keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pelaksana melalui berbagai saran. Kelompok pemilih juga memiliki kewenangan untuk mempengaruhi lembaga pelaksana caranya dengan melalui kritik yang dipublikasikan.
- d. Kesungguhan serta keterampilan dari birokrat dan pelaksana tugas agar dapat merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

### **2.1.5 Faktor Yang Menghambat Kebijakan**

Hal-hal yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan publik menjadi gagal adalah sebagai berikut: (Nurcholis, Enceng, dan Amin 2013:7.15)

1. Kebijakan publik yang telah dibuat tidak menjelaskan rincian secara lengkap berdasarkan spesifikasinya.
2. Badan pelaksana tugas yang diberi wewenang untuk menjalankan program kebijakan tidak sesuai.
3. Tidak berkorelasinya tujuan antara instansi satu dengan instansi lainnya.
4. Insentif dan biaya yang telah dipersiapkan tidak memadai, karena program kebijakan yang akan dikerjakan tidak seimbang dengan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Keterbatasan keahlian tertentu membuat implementator sulit untuk mengembangkan diri.

6. Belum memadainya sarana prasarana, tenaga atau sumber daya manusia, finansial serta organisasi pendukung.
7. Kegagalan komunikasi.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berikut uraian tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Reza, 2016), yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang dimuat pada Jurnal Katalogis, Volume 04, Nomor 6, Juni 2016. Pendekatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Diperoleh hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak belum optimal, hal ini masih terkendala aspek-aspek dalam mendukung implementasi kebijakan yang sejauh ini belum baik.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain, Heriyanto, dan Karneli, 2020), yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pakan Dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang dimuat pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020 (96-105). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program kebijakan telah dikerjakan dengan cukup baik akan tetapi belum dikerjakan secara maksimal. Dampak dari implementasinya yaitu peningkatan hasil budidaya ikan. Bagi anggota nelayan yang sudah bergabung

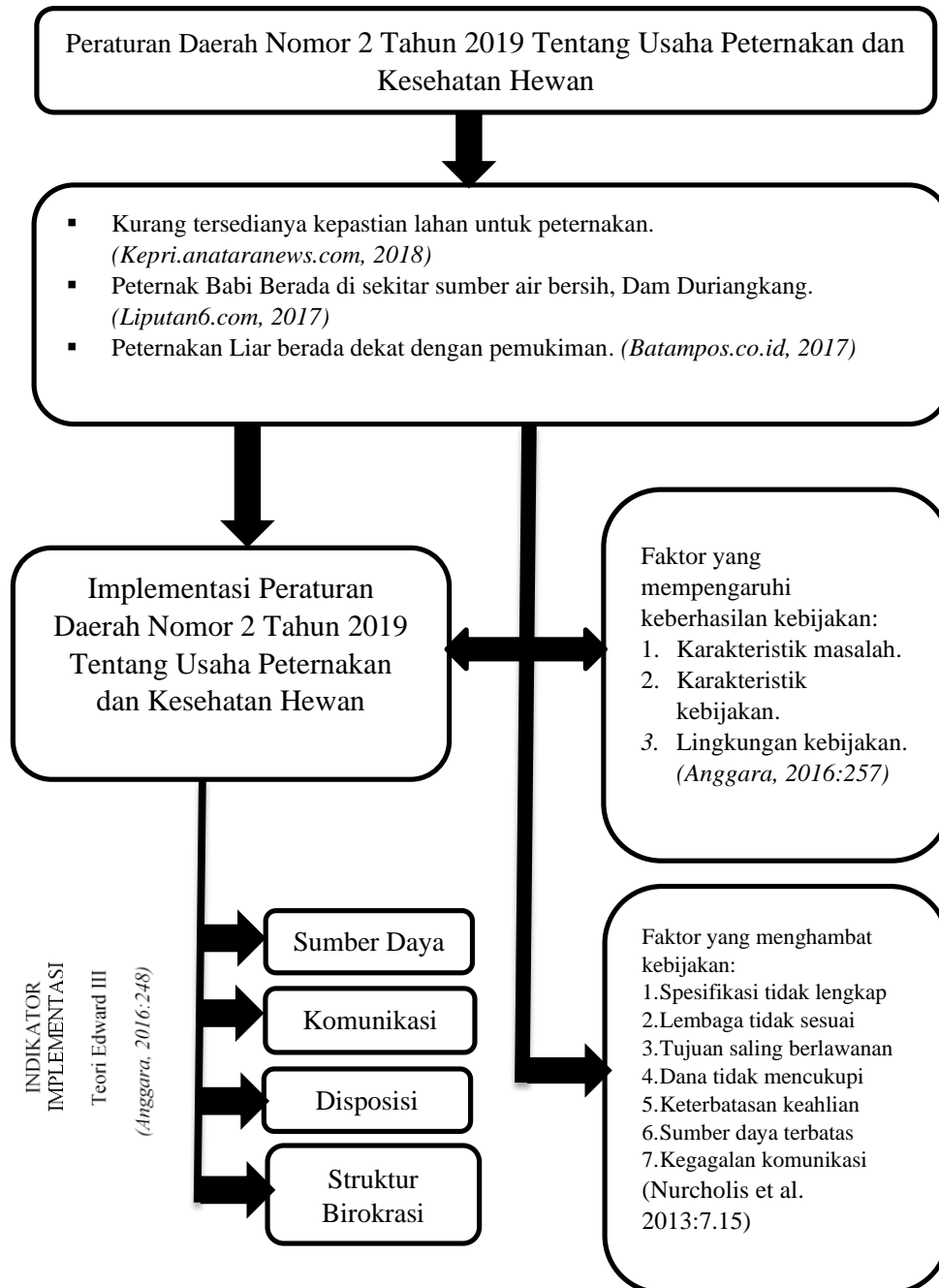
dalam Pokdakan belum merasakan manfaat yang sama dari bantuan yang dilimpahkan oleh Dinas Perikanan Kota Kampar.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (Ichtiar, Marefanda, dan Mardhiah, 2021), yang berjudul *Implementation of Marine and Fisheries Business Actor Card Policy (KUSUKA) in West Aceh Region* yang dimuat pada *Jurnal Public Policy*, Volume 7, Nomor 1, April 2021, ISSN 2502-0528. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang dipakai didalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan di Kabupaten Aceh Barat masih kurang baik karena masing-masing indikator yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birikrasi dan disposisi belum baik serta terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh (Indrayani dan Malau, 2019), yang berjudul *Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kanagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*, yang dimuat pada *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, Volume 03, Nomor 01, Tahun 2019. Penelitian ini memakai metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif naturalistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat sasaran kebijakan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Masih banyak ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti jalan raya dan pasar, hal ini terjadi karena terkendala komunikasi yang dilakukan sesama aparat terkait masih belum maksimal.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2015), yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam dan Babi di Pekanbaru), yang termuat dalam Jom FISIP, Volume 02, Nomor 01, Februari 2015. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data sekunder melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi peraturan daerah belum seluruhnya tercapai dengan baik karena belum tercukupinya sumber daya manusia sendiri dalam melakukan pembinaan ke lapangan, serta komunikasi dan kerja sama antara instansi-instansi pemerintahan belum tercipta dengan baik.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati, 2020), yang berjudul Efektifitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun, yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020. Di dalam penelitian ini menerapkan jenis metode kualitatif dengan Teknik Purposive Sampling sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik karena tujuan dan pencapaian hasil dari peraturan tersebut tidak sama dengan apa yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dari pemerintah pusat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masyarakatnya.

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh (Isna, 2009), yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati II Purbalingga), yang termuat dalam pada Wacana, Volume 12, Nomor 3, Juli 2009. Metode penelitian dengan metode memfokuskan pada proses dan makna dari usaha pengembangan ternak. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi sulit terwujud karena tidak didukung oleh sumber daya keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian tempat lokasi, kemampuan sumber daya manusia, kepastian keamanan lokasi serta kecenderungan pelaksana yang menggunakan pendekatan *top-down*.

### 2.3 Kerangka Penelitian



(Sumber: Penelitian 2021)

**Gambar 2.3** Kerangka penelitian